

BAB I

PENDAHULUAN

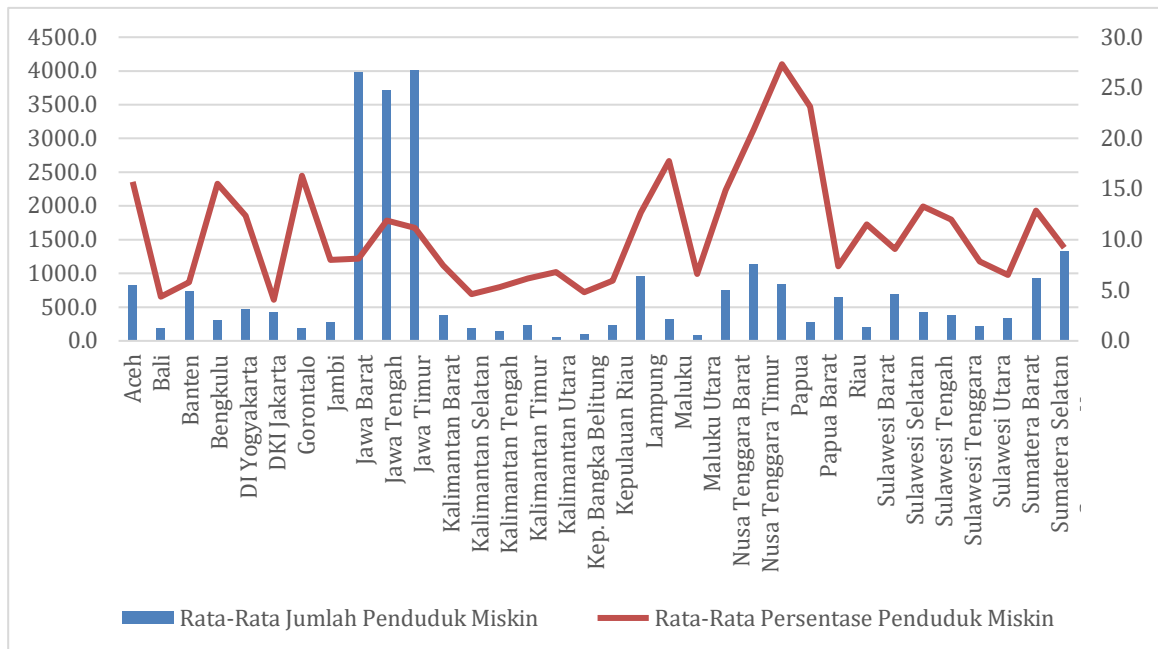
I.I Latar Belakang

Kemiskinan adalah tantangan yang sedang dihadapi beberapa negara maju maupun yang sedang berkembang. Negara berkembang seperti Indonesia, dengan populasi yang padat, mengatasi kemiskinan menjadi tantangan yang sulit karena jumlah penduduk miskin terus bertambah. Kemiskinan adalah masalah nasional yang terjadi di seluruh wilayah di Indonesia sebagai mana yang diungkapkan dalam teori kemiskinan dalam buku yang dikarang oleh Nurkse tahun 1953 (Salsabilla et al., n.d.). Kemiskinan terjadi ketika pendapatan tidak mencukupi untuk mencukupi keperluan dasar seperti sandang, pangan, papan. Kondisi tersebut membuat kualitas hidup rendah, sehingga banyak masyarakat yang tinggal di bawah garis kemiskinan serta memiliki pendapatan sangat terbatas bakal kebutuhan sehari-hari (Sembiring et al., 2023).

Pembangunan adalah proses perubahan yang dilaksanakan oleh semua bangsa karena pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mencapai kemajuan bagi bangsa itu sendiri (Juliannisa & Siswantini, 2021). Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 277 juta menempati urutan keempat di dunia. Meskipun Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang stabil pada beberapa dekade terakhir, masalah kemiskinan tantangan besar masih tetap ada (Abello & Sen, 2020). Sebagai negara yang memiliki ekonomi paling besar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih menghadapi kesenjangan pendapatan yang cukup lebar. Menurut data Bank Dunia, Indonesia menduduki peringkat ke-6 dalam hal total penduduk miskin, jika diukur berdasarkan jumlah absolut masyarakat yang bertahan hidup di bawah garis kemiskinan internasional.

Pulau Sumatera, salah satu pulau terbesar di Indonesia, terkenal akan kelimpahan budaya dan sumber daya alamnya yang cukup besar, menawarkan potensi besar untuk dikembangkan. Keanekaragaman budaya serta keindahan alamnya menjadi daya tarik tersendiri yang berpotensi mendukung pembangunan ekonomi wilayah ini. Namun, di

balik semua kelebihan tersebut, masalah kemiskinan tetap menjadi tantangan signifikan yang menghambat perkembangan sosial dan kesejahteraan masyarakat lokal. Permasalahan ini berdampak pada upaya peningkatan taraf hidup penduduk Sumatera, yang masih harus menghadapi kesenjangan sosial dan ekonomi di tengah potensi kekayaan wilayahnya (Permana & Pasaribu, 2023).



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

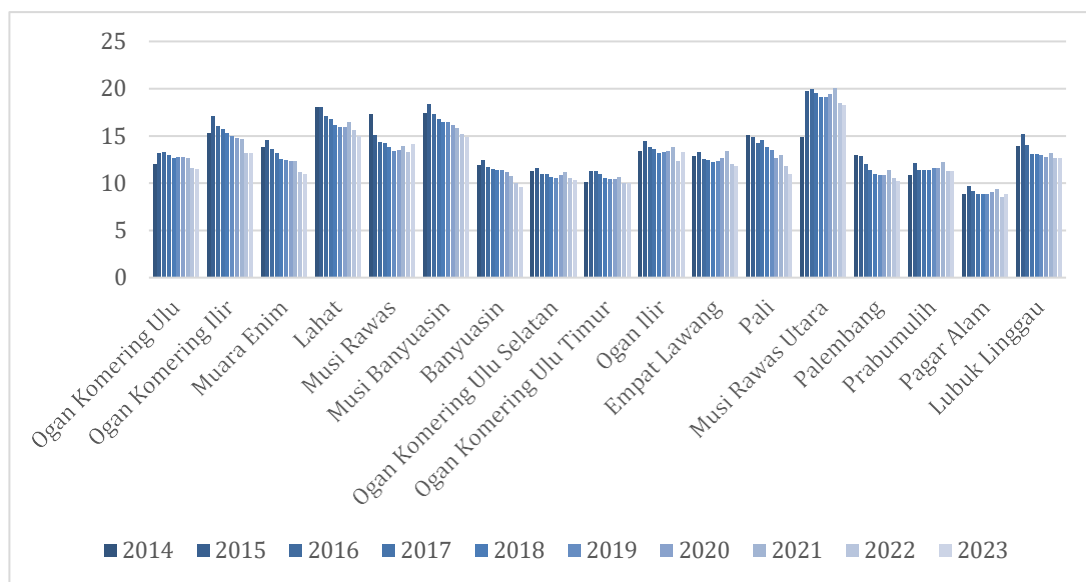
Gambar 1. Grafik Rata-Rata Jumlah Penduduk Miskin dan Rata-Rata Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2014-2023

Berdasarkan grafik yang ditampilkan, terlihat bahwa kemiskinan di Indonesia memiliki disparitas antardaerah yang cukup signifikan. Beberapa provinsi seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua menunjukkan persentase kemiskinan yang sangat tinggi, sementara provinsi lain seperti DKI Jakarta dan Bali memiliki angka yang jauh lebih rendah. Di Sumatera Selatan sendiri, persentase penduduk miskin berada di atas 10%, yang menunjukkan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi dan memerlukan perhatian khusus.

Indonesia terdiri dari berbagai pulau dengan karakteristik dan tantangan

tersendiri. Di Pulau Sumatera, Sumatera Selatan menjadi satu dari beberapa provinsi yang memiliki total penduduk yang besar setelah Pulau Jawa (Oktaviani, 2021). Tingginya jumlah penduduk ini diiringi oleh berbagai tantangan ekonomi, salah satunya adalah kemiskinan. Provinsi Sumatera Selatan mencakup 17 kabupaten/kota dengan luas cakupan sekitar 91.592,43 km², yang meliputi daerah perkotaan dan pedesaan dengan karakteristik ekonomi yang berbeda. Di beberapa daerah di Sumatera Selatan, ketimpangan ekonomi masih cukup terasa, terutama di daerah pedesaan.

Kemiskinan adalah satu dari beberapa masalah sosial yang mendesak dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Kemiskinan adalah keadaan di mana individu tidak memiliki kemampuan dasar untuk menjalani kehidupan yang layak (Lestari et al., 2024). Provinsi Sumatera Selatan, seperti kebanyakan kabupaten/kota di Indonesia, menghadapi tantangan signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Berikut Grafik Persentase kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2. Grafik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2023

Beberapa daerah kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin dapat menyumbang tinggi dan rendahnya tingkat kemiskinan yang terjadi pada suatu wilayah, tak terkecuali Provinsi Sumatera Selatan. Data menunjukkan bahwa meskipun

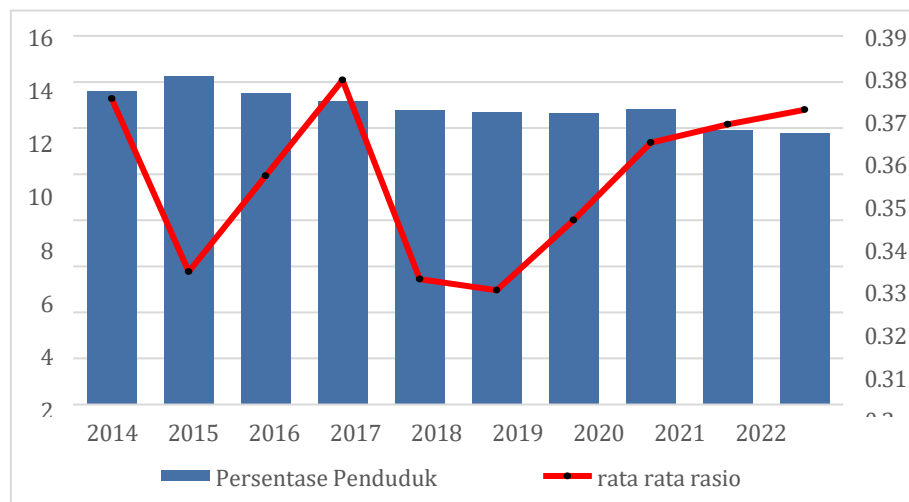
Regina Anastasya Atanus, 2024

PENGARUH RASIO GINI, PDRB, DAN BELANJA PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI SUMATERA SELATAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan
www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id

beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Selatan, seperti Palembang, Prabumulih, dan Pagar Alam, menunjukkan penurunan persentase penduduk miskin yang cukup signifikan dan konsisten berada di bawah 10%, kemiskinan di wilayah ini tetap perlu mendapat perhatian serius. Hal ini dikarenakan persentase kemiskinan di beberapa kabupaten lainnya, seperti Musi Rawas, Lahat, dan Musi Banyuasin, masih tergolong tinggi, sering kali mendekati atau melebihi 15%.

Apabila membandingkan tingkat kemiskinan dengan provinsi di Pulau Sumatera lainnya, kabupaten-kabupaten tertentu di Sumatera Selatan masih berada pada level yang memprihatinkan. Ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan antarwilayah masih signifikan, dan beberapa daerah masih menghadapi tantangan ekonomi yang besar. Persentase penduduk miskin selama periode 2014-2023, mencerminkan dinamika ekonomi yang berbeda-beda di masing-masing daerah. Ketersediaan data kemiskinan yang akurat memiliki potensi besar untuk mendukung upaya pemberantasan kemiskinan. Data tersebut dapat menjadi landasan yang kuat untuk menghitung perkiraan dan merumuskan strategi yang lebih mutakhir dalam memonitor angka kemiskinan setiap tahunnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 3. Grafik Rata-Rata Persentase Penduduk Miskin dan Rata-Rata Rasio Gini Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2023

Regina Anastasya Atanus, 2024

PENGARUH RASIO GINI, PDRB, DAN BELANJA PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI SUMATERA SELATAN

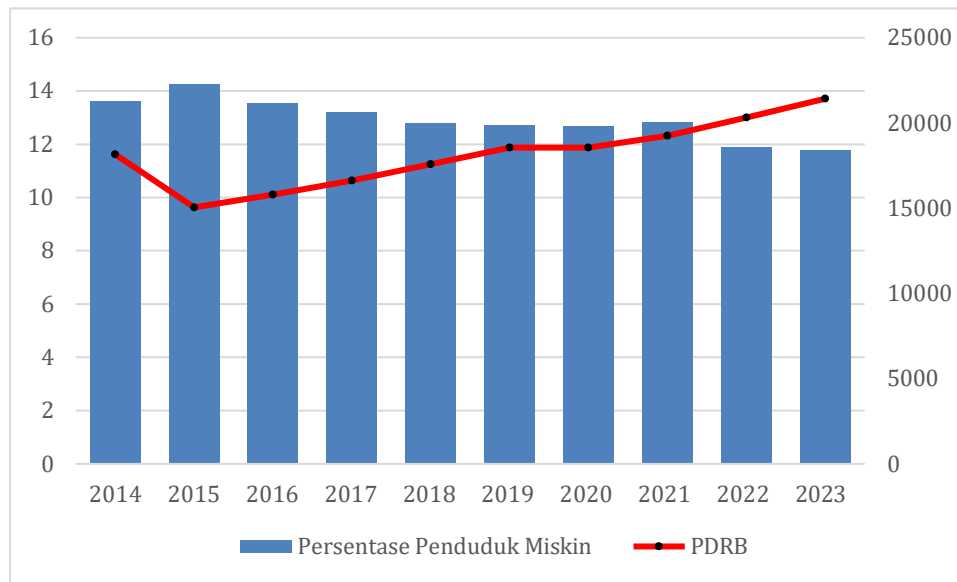
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Satu di antara faktor utama yang mempengaruhi kemiskinan adalah ketimpangan pendapatan, yang sering diperhitungkan dengan rasio gini. Rasio Gini yang besar menggambarkan ketidakmerataan distribusi penghasilan di masyarakat, di mana sebagian besar kekayaan terkonsentrasi pada sekelompok kecil orang kaya, sementara sebagian besar masyarakat lainnya memiliki pendapatan yang jauh lebih rendah. Ketimpangan ini mengakibatkan daya beli yang rendah bagi sebagian besar penduduk, sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Dalam periode 2014-2023, Kota Palembang mencatat Rasio Gini tertinggi, dengan nilai 0,418 pada tahun 2014, meskipun mengalami fluktuasi hingga mencapai 0,362 pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan yang signifikan, yang dapat berdampak negatif terhadap upaya penurunan kemiskinan. Sebaliknya, Kabupaten Musi Rawas mencatat Rasio Gini terendah, dengan nilai 0,239 pada tahun 2019, meskipun nilainya meningkat kembali menjadi 0,284 pada tahun 2023. Meskipun Musi Rawas menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata, tantangan tetap ada untuk menjaga dan memperbaiki kondisi ini. Secara keseluruhan, perhatian yang lebih besar terhadap nilai Rasio Gini di semua daerah di Sumatera Selatan diperlukan agar kebijakan pembangunan dapat kian efektif dalam menyusutkan jumlah kemiskinan serta menumbuhkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Amartya Sen, penurunan rasio Gini, yang merupakan indikator ketimpangan pendapatan, seharusnya berbanding lurus dengan penurunan tingkat kemiskinan (Endrawati et al., 2023). Namun, data menunjukkan fenomena yang menarik pada tahun 2015 dan 2019, di mana meskipun rasio Gini mengalami penurunan, persentase penduduk miskin justru meningkat. Hal ini mengindikasikan adanya gap atau ketidaksesuaian antara teori ekonomi dan kenyataan di lapangan.



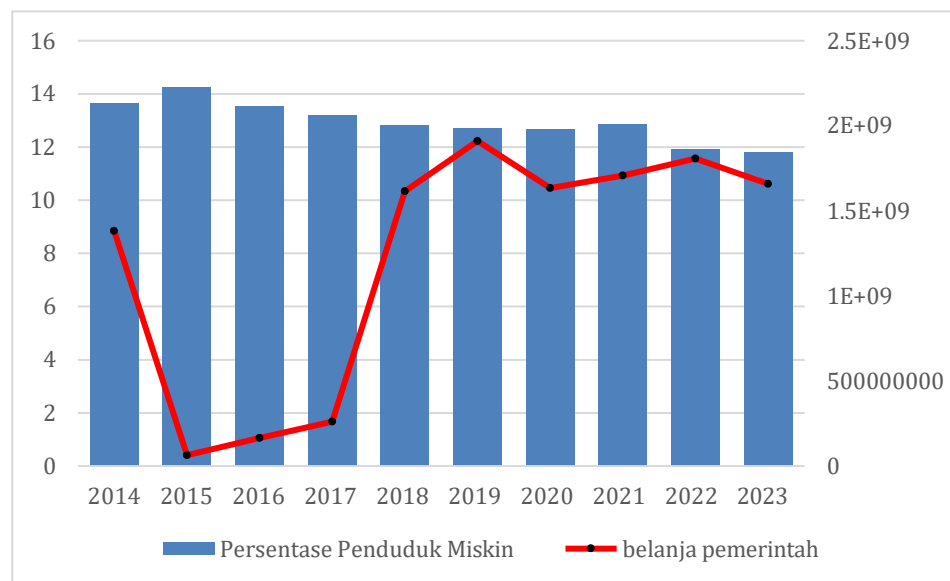
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 4. Grafik Rata-Rata Persentase Penduduk Miskin dan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2023

Data tersebut menunjukkan Rata-Rata Persentase Penduduk Miskin dan PDRB di 17 Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2014-2023. Secara umum, hampir semua kabupaten/kota mengalami peningkatan PDRB per kapita selama periode ini, dengan beberapa kabupaten/kota menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dalam periode 2014-2023, Kota Palembang mencatat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi, dengan nilai mencapai Rp 118.587,14 miliar pada tahun 2023. Sebaliknya, Kabupaten Empat Lawang mencatat PDRB terendah selama periode yang sama, dengan angka hanya Rp 3.468,23 miliar di periode 2014 dan bertambah menjadi Rp 3.946,21 miliar di periode 2023.

Faktor lain yang dapat memengaruhi tingkat kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Ketika pendapatan domestik suatu wilayah meningkat, hal ini menunjukkan kenaikan imbalan terhadap aspek produksi yang terlibat dalam prosedur produksi. Pada gilirannya, hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat, yang menjadi indikator seberapa besar kontribusi pertumbuhan tersebut dalam mengurangi

kemiskinan di wilayah tersebut (Padriyansyah et al., 2022). Satu dari berbagai cara untuk memberantas kemiskinan ialah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan laju perekonomian diharapkan dapat membuka lebih banyak kesempatan kerja serta menambah pemasukan masyarakat, dengan begitu tingkat kemiskinan dapat menurun secara signifikan (Ardhana, 2024). Sehingga PDRB seharusnya diikuti dengan penurunan kemiskinan. Namun, data pada grafik menunjukkan bahwa meskipun PDRB terus meningkat dari 2015 hingga 2023, persentase penduduk miskin tidak menurun secara konsisten. Ini menunjukkan adanya gap atau ketidaksesuaian antara teori dan realitas.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 5. Grafik Rata-Rata Pesentase Penduduk Miskin dan Rata-Rata Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 - 2023

Grafik tersebut menunjukkan rata-rata persentase masyarakat miskin serta rata-rata belanja pemerintah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu 2014-2023. Pada periode 2015–2017, terlihat adanya penurunan dalam belanja pemerintah. Beberapa faktor berperan dalam fenomena ini, antara lain pergantian

kepala daerah serta pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2015, yang diduga memengaruhi perencanaan dan alokasi anggaran daerah. Kondisi ini mengakibatkan pendekatan yang lebih konservatif dalam belanja untuk mengantisipasi perubahan kepemimpinan. Di samping itu, pada periode yang sama, perlambatan ekonomi global memberikan dampak terhadap Indonesia, termasuk Sumatera Selatan, sehingga pemerintah daerah cenderung melakukan efisiensi belanja melalui penghematan anggaran atau peninjauan ulang perencanaan anggaran daerah.

Semakin tinggi pengeluaran pemerintah di suatu daerah, semakin besar kemungkinan tingkat kemiskinan di daerah tersebut akan menurun (Nasution et al., 2023). Perubahan dalam kebijakan alokasi dana juga turut memengaruhi belanja pemerintah. Pada tahun 2015, pemerintahan pusat di bawah Presiden Joko Widodo mengimplementasikan reformasi dalam struktur APBN, yang berimplikasi pada perubahan distribusi anggaran bagi daerah (Pratiwi, 2024). Kebijakan ini berdampak pada Sumatera Selatan dalam hal alokasi dana transfer dari pusat, yang kemudian memengaruhi belanja daerah.

Sumatera Selatan memiliki kekayaan alam yang melimpah, diantaranya terdiri dari kekayaan sumber daya manusia, kekayaan alam, dan masih banyak lagi. Dengan sumber daya alam yang dimiliki tersebut tentu saja dapat menghasilkan pendapatan bagi Sumatera Selatan. Sektor utama unggulan yaitu, sektor pertanian, perdagangan, dan sektor penggalian pertambangan salah satunya gas, yang paling terkenal di Sumatera Selatan. Meskipun provinsi Sumatera Selatan memiliki kekayaan yang melimpah serta berbagai sektor unggulan, tidak serta merta dalam mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Manurung, 2022).

Mengacu pada latar belakang tersebut, penelitian yang lebih menyeluruh diperlukan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang mendorong perubahan level kemiskinan pada Provinsi Sumatera Selatan. Penting untuk menilai sejauh mana Rasio Gini, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta Belanja Pemerintah mempengaruhi kemiskinan pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu 2014-2023. Selama periode tersebut, berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan kebijakan telah terjadi, yang menimbulkan pertanyaan tentang hubungan antara

faktor-faktor ini dan tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

I.2 Perumusan Masalah

Provinsi Sumatera Selatan menghadapi tantangan besar dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Beberapa faktor ekonomi seperti Rasio Gini, PDRB, serta belanja pemerintah diduga mempunyai keterkaitan yang relevan dalam hubungannya dengan tingkat kemiskinan di daerah ini. Untuk memahami lebih lanjut pengaruh dari faktor-faktor tersebut, berikut adalah perumusan masalah yang akan diteliti:

1. Seberapa besar pengaruh Rasio Gini terhadap tingkat kemiskinan pada Provinsi Sumatera Selatan?
2. Seberapa besar pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan pada Provinsi Sumatera Selatan?
3. Seberapa besar pengaruh Belanja Pemerintah terhadap tingkat kemiskinan pada Provinsi Sumatera Selatan?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijabarkan sebelumnya oleh peneliti, maka dalam studi ini bertujuan diantaranya yakni:

1. Mengkaji pengaruh Rasio Gini terhadap tingkat kemiskinan pada Provinsi Sumatera Selatan.
2. Mengkaji pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan pada Provinsi Sumatera Selatan.
3. Mengkaji pengaruh Belanja Pemerintah terhadap tingkat kemiskinan pada Provinsi Sumatera Selatan.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan analisis mendalam tentang faktor-faktor seperti rasio gini, PDRB, dan belanja pemerintah terkait dengan tingkat kemiskinan pada Provinsi Sumatera Selatan, analisis ini dapat memperluas dan memperdalam pengetahuan kita tentang dinamika ekonomi regional dan pembangunan. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperbaiki model-model analitis yang digunakan dalam studi ekonomi, dengan menambahkan bukti empiris tentang pentingnya variabel-variabel ini dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, analisis ini tidak hanya menawarkan pengertian yang lebih jauh terkait aspek-aspek yang berperan dalam mengatasi kemiskinan, tetapi juga memperkaya kerangka teoritis yang digunakan dalam bidang ekonomi pembangunan secara lebih luas.

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Analisis penelitian mampu menyajikan panduan bagi peneliti atau analis kebijakan dalam merancang strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif di Provinsi Sumatera Selatan.

b) Bagi Instansi Pemerintah

Temuan penelitian mampu dijadikan dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efisien dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Informasi mengenai efektivitas belanja pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dapat membantu dalam pengalokasian anggaran yang lebih efisien.

c) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini mampu memberikan mahasiswa pemahaman yang mendalam tentang bagaimana variabel-variabel ekonomi mempengaruhi masalah sosial seperti kemiskinan. Hasil penelitian

mampu menjadi rujukan bagi mahasiswa yang memiliki ketertarikan untuk melanjutkan studi atau penelitian terkait masalah ekonomi pembangunan dan kemiskinan.